

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemacetan di Indonesia hingga kini masih menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi karena berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemacetan telah menjadi salah satu masalah utama di sektor transportasi yang menghambat mobilitas, menurunkan efisiensi waktu, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data Goodstats (2024), Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan tingkat kemacetan tertinggi di Asia, di mana beberapa kota besarnya seperti Bandung dan Medan bahkan masuk ke dalam 10 besar kota paling macet. Data ini menunjukkan bahwa persoalan kemacetan bukan lagi isu lokal, melainkan telah menjadi masalah nasional yang mencerminkan belum optimalnya sistem transportasi dan tata kelola lalu lintas di Indonesia (Alfathi, 2025).

Tingginya tingkat kemacetan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah masifnya pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat setiap tahunnya, tidak sebanding dengan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan yang tersedia. Kondisi ini diperparah oleh belum memadainya layanan transportasi umum, baik dari segi jumlah armada, keterjangkauan, maupun kenyamanan pengguna. Akibatnya, masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari, yang pada akhirnya memperparah kepadatan lalu lintas di berbagai kota besar. Selain itu, kurangnya kesadaran berlalu lintas, lemahnya pengawasan kebijakan transportasi, serta minimnya integrasi antar moda transportasi turut memperburuk situasi kemacetan di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem transportasi publik, mengendalikan pertumbuhan kendaraan pribadi, serta menciptakan mobilitas perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan (Harahap et al., 2022).

Selain permasalahan transportasi dan kemacetan, faktor keselamatan berkendara juga menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Keselamatan di jalan raya tidak hanya berkaitan dengan perilaku pengendara, tetapi juga dengan kondisi infrastruktur, kelayakan kendaraan, serta efektivitas pengawasan dari pihak berwenang. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di berbagai daerah menunjukkan bahwa aspek keselamatan masih menjadi tantangan besar dalam sistem transportasi di Indonesia. Dengan demikian, keselamatan berkendara menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja dan efektivitas pengelolaan transportasi, sekaligus mencerminkan sejauh mana kebijakan dan program yang diterapkan pemerintah mampu menjawab problematika nyata di lapangan (Mardikawati et al., 2025).

Kota Bandung dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Jawa Barat. Aktivitas masyarakatnya berlangsung sangat padat, mulai dari sektor kuliner, wisata, pendidikan, hingga berbagai kegiatan perdagangan dan jasa yang menjadi daya tarik utama kota ini. Setiap harinya, arus kendaraan dan mobilitas penduduk terus meningkat seiring dengan perkembangan wilayah dan pertambahan jumlah penduduk. Namun, di balik pesatnya perkembangan tersebut, Kota Bandung masih menghadapi persoalan kemacetan yang cukup serius. Volume kendaraan pribadi yang tinggi, keterbatasan kapasitas jalan, serta belum optimalnya sistem transportasi publik menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi lalu lintas. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada efisiensi waktu, kualitas udara, serta kenyamanan aktivitas sehari-hari di Kota Bandung (Nabilah et al., 2022).

Selain kemacetan, konektivitas transportasi umum antar moda dan jalan masih jadi masalah besar yang belum teratasi di Kota Bandung. Seperti sistem bus Trans Metro Bandung belum terhubung secara optimal dengan layanan kereta api Bandung Raya. Kondisi ini membuat perjalanan menjadi lebih rumit, dan kurang praktis, sehingga sebagian masyarakat cenderung enggan menggunakan transportasi umum, yang akhirnya memperburuk kemacetan karena lebih banyak orang beralih ke kendaraan pribadi. Dari perspektif *Good Governance*, masalah ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan transparansi antar lembaga, yang

seharusnya membuat sistem transportasi lebih efisien dan responsive (Asri et al., 2025). Dengan demikian, Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu meningkatkan akuntabilitasnya untuk mengintegrasikan moda transportasi ini, agar bisa mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi dan memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung telah berupaya memperluas akses transportasi publik melalui pengembangan rute baru dan peningkatan sarana prasarana, hasilnya belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau secara efektif oleh angkutan umum, sementara sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena pertimbangan kenyamanan dan waktu tempuh. Sistem transportasi yang baik tidak hanya bergantung pada ketersediaan moda, tetapi juga pada konektivitas dan integrasi antarmoda yang memungkinkan pergerakan masyarakat berlangsung cepat, aman, dan berkelanjutan.

Selain tidak terkoneksinya sistem transportasi umum di Kota Bandung, masalah keselamatan berkendara juga menjadi perhatian serius yang perlu segera diselesaikan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan tingginya potensi kecelakaan di jalan, tetapi juga menunjukkan lemahnya budaya keselamatan di kalangan masyarakat dan belum optimalnya upaya pengawasan terhadap kendaraan umum maupun pribadi. Banyak pengendara yang masih abai terhadap aturan lalu lintas, seperti kecepatan berkendara, penggunaan helm atau sabuk pengaman, serta disiplin di persimpangan jalan. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya fasilitas penunjang keselamatan, seperti marka jalan yang jelas, penerangan yang memadai, serta jalur khusus bagi pengguna rentan seperti pejalan kaki dan pesepeda (Darmansyah & Prasetyanto, 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem transportasi di Kota Bandung belum sepenuhnya berorientasi pada keselamatan pengguna jalan. Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan penguatan sarana prasarana keselamatan perlu dijadikan prioritas utama agar tercipta lingkungan transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan bagi seluruh pengguna jalan.

Dalam melihat fenomena yang terjadi, diperlukan peran lembaga publik untuk mengatasi berbagai permasalahan transportasi yang muncul di Kota Bandung.

Lembaga publik memiliki peran penting sebagai penggerak, pengawas, sekaligus fasilitator dalam mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan aman bagi masyarakat. Melalui perencanaan kebijakan yang tepat, koordinasi antarinstansi, serta pelibatan masyarakat, lembaga publik diharapkan mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan terhadap masalah seperti kemacetan, keselamatan berkendara, hingga ketidakterhubungan antar moda transportasi. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian, komunitas transportasi, dan sektor swasta agar penanganan transportasi ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi, bukan secara terpisah-pisah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan transportasi publik juga harus dijaga agar kebijakan yang diterapkan dapat dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dengan sinergi yang baik antar lembaga publik dan dukungan masyarakat, diharapkan sistem transportasi di Kota Bandung dapat berkembang ke arah yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan sosial (Edie, 2019).

Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi berbagai permasalahan transportasi yang terjadi di wilayahnya. Sebagai instansi teknis pemerintah daerah, Dinas Perhubungan berperan penting dalam merencanakan, mengatur, serta mengawasi penyelenggaraan sistem transportasi agar berjalan tertib, aman, dan efisien. Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup pengendalian arus lalu lintas dan pengelolaan angkutan umum, tetapi juga mencakup upaya integrasi antar moda transportasi, peningkatan keselamatan jalan, dan pengurangan tingkat kemacetan di berbagai titik rawan. Melalui penyusunan kebijakan berbasis data serta penerapan teknologi transportasi cerdas, Dinas Perhubungan diharapkan mampu menghadirkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk menjawab kompleksitas permasalahan transportasi perkotaan. Di sisi lain, kerja sama lintas sektor dengan kepolisian, lembaga perencanaan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih teratur dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan peran strategis tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak hanya bertugas sebagai pengelola transportasi,

tetapi juga sebagai motor penggerak dalam mewujudkan mobilitas perkotaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Edie, 2019).

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Capaian
1.	Melebihi/Melampaui Target	33.33 %
2.	Sesuai Target	0.00 %
3.	Tidak Mencapai Target	66.67%

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024)

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024, terdapat enam indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan transportasi. Namun, dari enam indikator tersebut, hanya dua indikator (33,33%) yang melampaui target, sementara empat indikator lainnya (66,67%) belum mencapai target. Ketidaksesuaian ini menandakan adanya kesenjangan antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan adanya jarak antara “das sollen” (kondisi ideal/pemenuhan target) dan “das sein” (kondisi faktual) yang nyata di lapangan. Fenomena ini menjadi dasar penting untuk menelaah akuntabilitas kinerja instansi, sebab perbedaan antara target dan capaian dapat memengaruhi efektivitas kebijakan transportasi, persepsi masyarakat, dan implementasi program di masa depan.

Tabel 1. 2 Presentase Penurunan Kemacetan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penurunan kemacetan lingkup urusan perhubungan	7.58	7.70	98.42

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 1. 2 di atas yang menjelaskan tentang indikator persentase penurunan kemacetan lingkup urusan perhubungan merupakan tolak ukur penting dalam menilai efektivitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menangani kepadatan lalu lintas. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 7,58%, sementara realisasi yang dicapai hanya 7,70%, dengan capaian kinerja sebesar 98,42%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi kemacetan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan (Kinerja & Pemerintah, 2024).

Capaian ini mencerminkan bahwa masalah kemacetan di Kota Bandung masih menjadi tantangan serius. Penyebabnya antara lain adalah pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang tinggi, keterbatasan kapasitas jalan, serta integrasi transportasi publik yang belum merata dan optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengurangan kemacetan, termasuk optimalisasi rute angkutan umum, manajemen arus lalu lintas berbasis teknologi, serta koordinasi antar instansi terkait. Hanya dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, target penurunan kemacetan tidak hanya tercapai secara angka, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kelancaran mobilitas masyarakat dan kualitas lingkungan perkotaan.

Tabel 1. 3 Rasio Pengguna Angkutan Umum dan Angkutan Pribadi

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi	1:3.601	1:3.350	106.97

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 1. 3 di atas tentang indikator rasio pengguna angkutan umum terhadap pengguna angkutan pribadi menggambarkan sejauh mana masyarakat Kota Bandung memilih menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Pada tahun 2024, rasio target yang ditetapkan sebesar 1:3.601, sedangkan realisasinya tercatat 1:3.350, dengan capaian kinerja mencapai 106,97% (Kinerja & Pemerintah, 2024). Artinya, setiap satu pengguna angkutan umum berbanding

dengan sekitar tiga hingga empat pengguna kendaraan pribadi. Namun, secara realisasi, pengguna kendaraan pribadi masih mendominasi mobilitas di Kota Bandung. Berdasarkan databoks (2025) jumlah pengguna kendaraan pribadi di Kota Bandung pada pertengahan tahun 2025 mencapai sekitar 2,39 juta unit, angka yang tergolong sangat tinggi. Dengan hal ini menandakan bahwa meskipun kebijakan peningkatan layanan angkutan umum mulai menunjukkan hasil positif, tetapi daya tarik kendaraan pribadi tetap lebih tinggi karena faktor kenyamanan, fleksibilitas waktu, dan persepsi efisiensi perjalanan yang lebih baik (Fadhlurrahman, 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pergeseran pola mobilitas masyarakat menuju transportasi publik masih berjalan lambat dan belum mencapai titik ideal. Keberhasilan transportasi publik tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah armada atau rute, tetapi juga pada kemudahan akses, keterpaduan moda, serta kualitas layanan yang mampu menyaingi kenyamanan kendaraan pribadi.

Tabel 1. 4 Indeks Fatalitas Kendaraan yang Berkeselamatan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	0.885	1.000	87.01

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan
Kota Bandung Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 1. 4 di atas tentang target indikator indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan ini ditetapkan 0,885, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 1,000, sehingga capaian kinerjanya yaitu 87,01% (Kinerja & Pemerintah, 2024). Hasil ini mengindikasikan adanya risiko kecelakaan yang relatif tinggi di jalan-jalan Kota Bandung. Kondisi ini menjadi perhatian penting, karena keselamatan lalu lintas merupakan salah satu aspek utama dalam memberikan pelayanan transportasi publik yang efektif dan bertanggung jawab.

Capaian yang belum optimal ini menggambarkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi keselamatan lalu lintas. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya indeks fatalitas antara lain masih adanya kendaraan yang belum memenuhi standar keselamatan, perilaku pengemudi yang belum sepenuhnya patuh pada aturan, serta keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, peningkatan indeks keselamatan memerlukan langkah-langkah strategis seperti pengawasan kendaraan secara rutin, edukasi keselamatan berkendara, pengaturan arus lalu lintas, serta penerapan teknologi untuk monitoring dan mitigasi risiko kecelakaan. Upaya ini penting agar akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan dalam aspek keselamatan dapat tercapai secara menyeluruh dan berdampak nyata pada masyarakat.

Tabel 1. 5 Indeks Fatalitas Penduduk Lingkup Pilar Kendaraan Berkeselamatan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	6.500	8.800	64.62

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 1. 5 di atas mengenai indikator indeks fatalitas per 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan dalam menilai keselamatan transportasi secara luas di Kota Bandung. Dalam indikator ini target yang ditetapkan adalah 6,500, sedangkan realisasi yang dicapai 8,800, sehingga capaian kinerjanya yaitu 64,62% (Kinerja & Pemerintah, 2024). Dengan ini menunjukkan bahwa tingkat keselamatan transportasi terhadap populasi penduduk masih jauh dari target, menandakan risiko fatalitas lalu lintas yang signifikan di kota. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, karena keselamatan warga merupakan aspek fundamental/mendasar dari pelayanan publik di sektor transportasi.

Rendahnya indeks ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam penerapan standar keselamatan, pengawasan kendaraan, dan kepatuhan pengguna jalan.

Faktor-faktor seperti perilaku pengemudi, kualitas kendaraan yang belum memenuhi standar keselamatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung keselamatan lalu lintas menjadi penyebab utama capaian yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan keselamatan yang komprehensif, mulai dari penguatan regulasi dan penegakan hukum, edukasi keselamatan berkendara, hingga penerapan teknologi untuk memonitor dan mengurangi risiko kecelakaan. Dengan pendekatan yang sistematis, diharapkan pencapaian indikator ini dapat meningkat, sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan dalam bidang keselamatan dapat tercapai dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat pengguna jalan.

Tabel 1. 6 Presentase Konektivitas Jalan Yang Terlayani Angkutan Umum

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	36.58	36.24	99.07

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 1.6 di atas mengenai indikator Persentase Konektivitas Jalan yang Sudah Terlayani Angkutan Umum berfungsi untuk mengukur sejauh mana jaringan jalan di Kota Bandung telah terintegrasi dengan sistem transportasi publik. Pada tahun 2024, indikator ini memiliki target sebesar 36,58%, namun realisasinya hanya mencapai 36,24%, dengan capaian kinerja sebesar 99,07% (Kinerja & Pemerintah, 2024). Meskipun angka capaian ini tergolong tinggi, hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan angkutan umum. Kondisi ini menandakan bahwa aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik belum merata, terutama di wilayah pinggiran kota yang pertumbuhan permukimannya cukup pesat. Kurangnya konektivitas juga berpengaruh terhadap tingginya penggunaan kendaraan pribadi karena masyarakat cenderung memilih moda transportasi yang lebih mudah diakses, meskipun hal itu berdampak pada meningkatnya volume lalu lintas dan kemacetan di pusat kota.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa upaya integrasi antar moda transportasi di Kota Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi infrastruktur maupun koordinasi antarinstansi. Sistem transportasi publik yang baik tidak hanya bergantung pada jumlah moda yang tersedia, tetapi juga pada tingkat keterhubungan antar jaringan yang mampu memberikan kemudahan bagi pengguna dalam berpindah moda tanpa hambatan yang berarti. Peningkatan konektivitas antarjalan dan antar moda menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung agar pelayanan transportasi publik tidak hanya terfokus pada kuantitas rute, tetapi juga kualitas keterjangkauannya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 1. 7 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	85.50	85.72	100.54

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 1.7 di atas tentang indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam menilai persepsi publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. IKM menunjukkan target sebesar 85,50, dengan realisasi mencapai 85,72, sehingga capaian kinerjanya berada pada angka 100,54% (Kinerja & Pemerintah, 2024). Hasil ini mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat merasa cukup puas terhadap layanan transportasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tingginya persepsi masyarakat mencerminkan keberhasilan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Namun, capaian ini belum sejalan dengan capaian teknis pada beberapa indikator lain, seperti keselamatan dan penurunan kemacetan yang justru belum mencapai target, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara persepsi masyarakat dan kondisi operasional nyata. Oleh sebab itu, meskipun nilai IKM menunjukkan tren positif, pemerintah perlu tetap melakukan evaluasi mendalam terhadap dimensi pelayanan publik, agar kepuasan masyarakat benar-benar sejalan

dengan peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan karna bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung tercermin melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan di bidang transportasi. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja, meningkatkan koordinasi antarbidang, serta memastikan agar setiap target kinerja dapat tercapai secara lebih konsisten dan berkelanjutan di masa mendatang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2024, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sebagian besar indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung belum mencapai target yang ditetapkan. Hanya dua indikator yang melampaui target sementara empat lainnya masih di bawah capaian.
2. Terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan program dan realisasi kinerja di lapangan.
3. Aspek keselamatan transportasi masih belum optimal dengan capaian indeks fatalitas dan kendaraan berkeselamatan di bawah target.
4. Penurunan tingkat kemacetan belum signifikan, menandakan perlunya strategi penanganan yang lebih efektif.
5. Konektivitas antara jaringan jalan dan layanan angkutan umum belum maksimal sehingga aksesibilitas belum merata. Ditandai oleh sebagian wilayah Kota Bandung masih belum terlayani secara optimal oleh transportasi publik.
6. Tingkat kepuasan masyarakat belum sejalan dengan kinerja teknis yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum dan kejujuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam memastikan setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan?
2. Bagaimana manajerial kinerja yang dijalankan oleh pimpinan dan aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pengelolaan sumber daya, serta pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien?
3. Bagaimana kebijakan dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan transportasi publik yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung?
4. Sejauh mana program tercermin melalui kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung, terutama dalam pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan?
5. Bagaimana finansial kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik secara transparan, dan efisien?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis hukum dan kejujuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan.
2. Untuk menilai pelaksanaan manajerial kinerja oleh pimpinan dan aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengelola sumber daya, serta memastikan tercapainya tujuan organisasi secara optimal.
3. Untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi

kebijakan transportasi publik guna mewujudkan pelayanan yang efektif dan berkelanjutan.

4. Untuk mengidentifikasi program, dengan melihat sejauh mana kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja telah tercapai sesuai dengan target dan indikator yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
5. Untuk menilai finansial kinerja dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, dengan mengacu pada prinsip transparansi, dan efisiensi.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam kajian Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengelolaan transportasi publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemahaman tentang penerapan prinsip *good governance*, pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU), serta evaluasi efektivitas program di sektor perhubungan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kualitas kajian dan praktik di bidang Administrasi Publik, khususnya terkait akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung, termasuk analisis capaian indikator kinerja yang melampaui target maupun yang belum tercapai, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tersebut.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau sektor transportasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan pengembangan studi lebih lanjut, baik dari sisi metodologi maupun topik kajian yang lebih luas.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan praktis bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik serta mengoptimalkan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui layanan transportasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran peneliti dalam mengkaji permasalahan yang diteliti mengenai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung, yang ditunjukkan oleh rendahnya capaian indikator kinerja utama (IKU), lemahnya koordinasi antarbidang, serta belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas yang diterapkan belum berjalan efektif, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kinerja organisasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori akuntabilitas publik menurut Elwood (1993) sebagai dasar konseptual. Teori ini membagi akuntabilitas ke dalam lima dimensi utama, yaitu :

1. Hukum dan kejujuran, menekankan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan norma etika dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dinas Perhubungan harus menjalankan seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menjaga integritas aparatur. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandung telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dijalankan secara jujur tanpa kepentingan pribadi maupun golongan yang berfokus pada sejauh mana aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan dan prinsip kejujuran publik.
2. Manajerial, berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam proses manajemen internal, mencakup kemampuan pimpinan dan staf dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengawasi pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan. Dalam konteks penelitian ini, dimensi ini menilai bagaimana setiap bidang bekerja secara terkoordinasi, sejauh mana sumber daya dimanfaatkan secara optimal, serta bagaimana pimpinan mengawasi pelaksanaan tugas agar target kinerja tercapai.
3. Kebijakan, menyoroti pertanggungjawaban pejabat publik dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus mencerminkan kebutuhan publik, memiliki dasar analisis yang jelas, dan sejalan dengan visi serta misi pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, kebijakan akan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana keputusan yang diambil oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung relevan dengan permasalahan transportasi di Kota Bandung, serta bagaimana proses perumusan kebijakan melibatkan partisipasi publik dan memperhatikan aspek keberlanjutan.
4. Program, menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Program menitik beratkan pada kejelasan tujuan, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) dan efektivitas program dalam

mengatasi masalah transportasi, kemacetan, dan keselamatan lalu lintas. Rendahnya pencapaian target menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program agar dapat ditingkatkan di masa mendatang.

5. Finansial, menyangkut pengelolaan dana masyarakat dengan menekankan pentingnya transparansi, dan efisiensi. Dinas Perhubungan Kota Bandung harus dapat menunjukkan bahwa setiap penggunaan anggaran publik dilakukan secara tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengevaluasi sejauh mana laporan keuangan disusun secara terbuka, serta apakah penggunaan anggaran mendukung kinerja pelayanan publik.

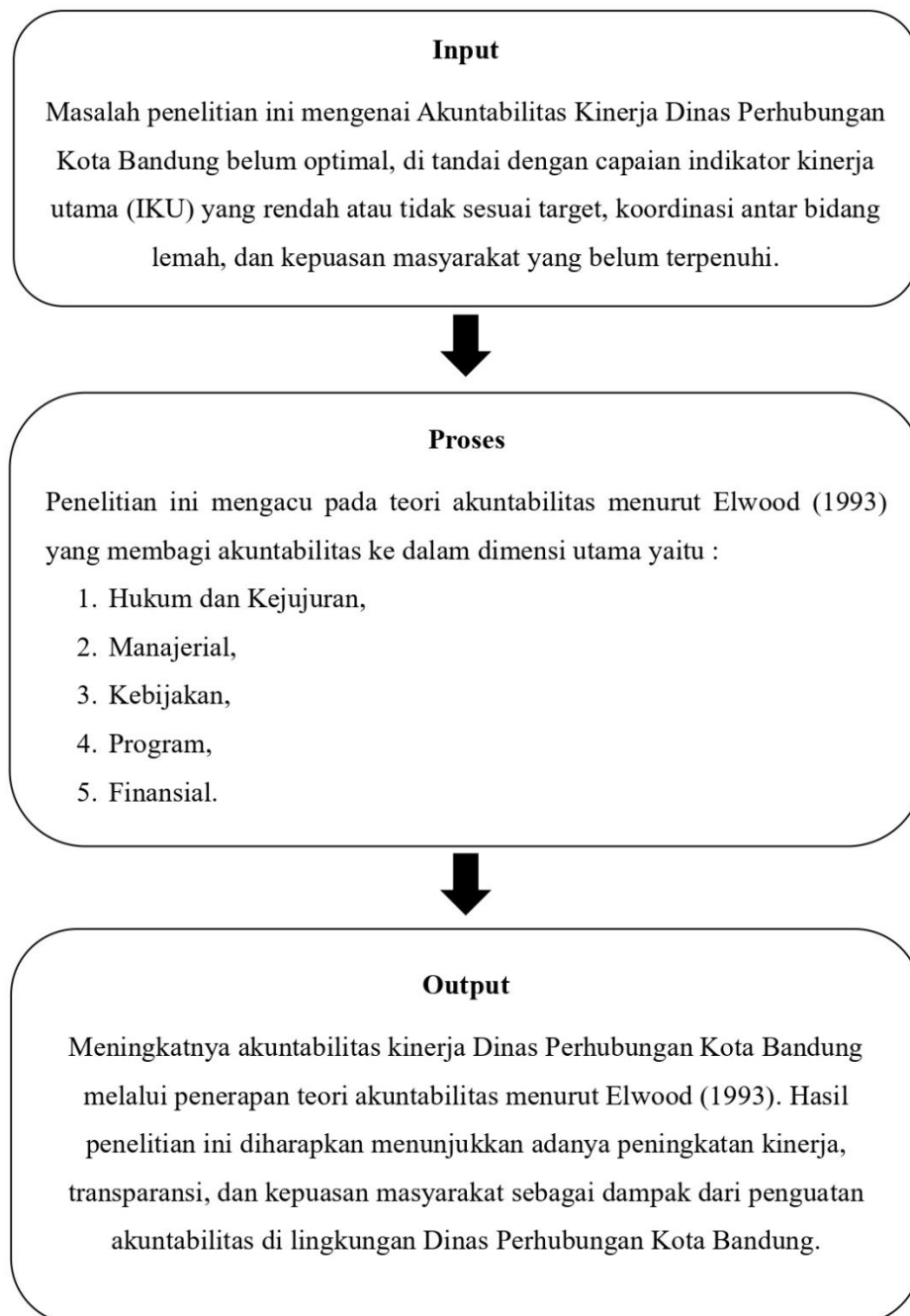
Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa penerapan lima dimensi akuntabilitas tersebut saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistem kinerja yang utuh. Apabila salah satu dimensi tidak berjalan optimal, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap dimensi lainnya. Melalui penerapan teori ini, peneliti dapat menganalisis secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat akuntabilitas serta mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembenahan sistem tata kelola, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan pengawasan dan transparansi publik.

Penyusunan kerangka berpikir ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara teori-teori yang telah dibahas sebelumnya dengan variabel penelitian yang akan dianalisis. Melalui kerangka berpikir ini, peneliti berupaya menjelaskan bagaimana konsep-konsep teoritis dapat diterapkan dalam konteks penelitian secara sistematis dan terarah. Dengan demikian, kerangka berpikir menjadi dasar yang penting dalam menentukan arah analisis serta membantu peneliti memahami keterkaitan antar unsur yang memengaruhi hasil penelitian.

Dengan demikian, hasil dari penerapan kerangka berpikir ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi aktual akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung. Output penelitian berupa evaluasi kinerja menggunakan teori akuntabilitas Sheila Elwood (1993) akan memperlihatkan dimensi-dimensi yang sudah berjalan dengan baik serta aspek-

aspek yang masih perlu ditingkatkan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki koordinasi antarbidang, serta mendorong peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang transportasi. Karena itu kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir



(Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025)